MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

EVALUASI APLIKASI WEB PUSKEU POLRI SEBAGAI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGADAAN BARANG DAN MODAL: PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA BIDANG KEUANGAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

Elsafira Ashanti[1], Hastanti Agustin Rahayu[2*]
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Email: elsafira.ashanti09805@gmail.com[1], hastanti.rahayu@uinsa.ac.id[2*]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aplikasi web Puskeu Polri sebagai alat pengendalian internal dalam pengadaan barang dan modal serta verifikasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi proses administrasi, mempercepat verifikasi data, serta meningkatkan transparasi dalam pengelolaan keuangan. Namun, hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, pemahaman pengguna yang tidak merata, dan risiko teknis seperti gangguan server masih menjadi tantangan dalam penerapannya. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan pelatihan, penguatan infrastruktur, dan pengembangan keamanan sistem untuk memastikan efektivitas aplikasi dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan efisien.

Kata Kunci: Aplikasi Web Puskeu Polri, Pengendalian Internal, Pengadaan Barang dan Modal, Pertanggungjawaban Keuangan

ABSTRACT

This research aims to evaluate the Puskeu Polri web application as an internal control tool in the procurement of goods and capital as well as the verification of financial accountability reporting in the East Java Regional Police Finance Sector. Through a qualitative descriptive approach, data is obtained through interviews, observations, and document analysis. Research results show that this application is able to increase the efficiency and accuracy of administrative processes, accelerate data verification, and increase transparency in financial management. However, obstacles such as limited technology infrastructure, uneven user understanding, and technical risks such as server disruptions are still challenges in its implementation. Recommendations provided include increased training, infrastructure strengthening, and system

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

security development to ensure the effectiveness of applications in supporting more accountable and efficient financial governance.
Keywords: *Puskeu Polri Web Application, Internal Control, Procurement of Goods and Capital, Financial Accountability*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola organisasi, terutama di institusi pemerintah seperti Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri tidak hanya bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki kewajiban mengelola anggaran untuk mendukung operasional organisasinya. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah pengadaan barang dan modal, yang membutuhkan pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa proses pengadaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola yang baik. Namun, proses pengadaan ini kerap menjadi sorotan karena rentan terhadap potensi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian keuangan negara.

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Aplikasi web Puskeu Polri dirancang sebagai inovasi yang mendukung proses pengelolaan keuangan yang lebih modern, termasuk pengendalian internal dalam pengadaan barang dan modal serta verifikasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu). Dengan fitur pencatatan, verifikasi, dan pelaporan secara digital, aplikasi ini mampu meminimalkan risiko kesalahan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Inovasi ini sejalan dengan upaya memperkuat integritas dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara, yang menjadi pilar utama tata kelola sektor publik.

Namun, penerapan aplikasi web Puskeu Polri tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah dengan akses internet yang kurang memadai, serta tingkat pemahaman pengguna yang belum merata. Selain itu, potensi risiko teknis, seperti gangguan server dan ancaman keamanan siber, juga menjadi perhatian dalam penerapan aplikasi berbasis web. Tantangan-tantangan ini dapat memengaruhi efektivitas aplikasi dalam mendukung pengendalian internal di lingkungan Polri. Oleh karena itu, evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana aplikasi dapat mendukung proses pengadaan barang dan modal serta verifikasi perwabkeu, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kepolisian Daerah Jawa Timur, sebagai salah satu institusi besar di bawah Polri, menjadi lokasi yang relevan untuk mengevaluasi implementasi aplikasi web Puskeu Polri. Dengan berbagai aktivitas operasional dan pengelolaan keuangan yang signifikan, Puskeu Polda Jatim memainkan peran vital dalam memastikan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengelolaan keuangan Polri yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Maulana, 2021). Sistem ini melibatkan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk melindungi aset, mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan, serta memastikan keandalan laporan keuangan. Pengendalian internal juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan mendukung tata kelola yang baik. Dalam praktiknya, pengendalian internal mencakup berbagai aspek, mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, hingga pemantauan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengendalian internal sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Mekanisme ini dapat melibatkan langkah-langkah seperti otorisasi transaksi, pencatatan yang akurat, dan pengawasan berkala untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan (Liana & Alya, 2023). Selain itu, pengendalian internal membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik risiko operasional, keuangan, maupun reputasi.

Di Indonesia, pengendalian internal di lingkungan kepolisian diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) peraturan ini merupakan landasan hukum bagi penerapan SPIP di seluruh instansi pemerintah, termasuk kepolisian. (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan ini merupakan turunan dari PP Nomor 60 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur penerapan SPIP di lingkungan Polri.

Aplikasi Web

Aplikasi web adalah perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan melalui browser web, memungkinkan pengguna mengaksesnya tanpa perlu menginstal program secara langsung di perangkat mereka. Berbasis teknologi internet, aplikasi web biasanya menggunakan server untuk memproses data dan mengirimkan hasilnya ke pengguna melalui antarmuka yang ramah pengguna (Arifin et al., 2018). Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengelolaan data, komunikasi, perdagangan elektronik, hingga layanan publik. Keunggulan utama aplikasi web adalah fleksibilitasnya, karena dapat diakses dari berbagai perangkat selama terhubung ke internet, serta kemudahan pembaruan dan pemeliharaan yang dilakukan langsung di server pusat.

Dalam dunia kerja modern, aplikasi web sering diandalkan untuk mendukung produktivitas, kolaborasi, dan pengelolaan sumber daya. Misalnya, aplikasi web berbasis akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengelola laporan keuangan secara real-time dan terintegrasi lintas divisi (Timang et al., 2022). Dibandingkan dengan perangkat lunak tradisional, aplikasi web lebih hemat biaya karena tidak memerlukan instalasi perangkat lunak individu dan mendukung kerja jarak jauh.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Namun, aplikasi web juga menghadapi tantangan, seperti ketergantungan pada koneksi internet, potensi ancaman keamanan siber, dan kebutuhan akan server yang andal untuk memastikan kinerja optimal (Wahono et al., 2023). Oleh karena itu, pengembangan aplikasi web memerlukan perhatian khusus terhadap desain antarmuka yang intuitif, perlindungan data yang kuat, dan infrastruktur teknologi yang memadai. Dengan keunggulannya, aplikasi web telah menjadi solusi teknologi yang penting untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari bisnis hingga pemerintahan.

Pertanggungjawaban Keuangan (Perwabkeu)

Pertanggungjawaban keuangan adalah proses pelaporan dan verifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan, peraturan, dan prinsip-prinsip akuntabilitas (Siti et al., 2023). Dalam konteks institusi pemerintah, seperti Kepolisian Daerah, pertanggungjawaban keuangan mencakup pelaporan atas setiap pengeluaran, baik untuk operasional rutin maupun kegiatan strategis seperti pengadaan barang dan modal. Proses ini melibatkan penyusunan dokumen pendukung, seperti kuitansi, faktur, dan laporan kegiatan, yang kemudian diverifikasi oleh pihak yang berwenang untuk memastikan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian penggunaan dana dengan anggaran yang telah disetujui.

Pertanggungjawaban keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas institusi dalam pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan, seperti pemborosan, penyalahgunaan anggaran, atau laporan fiktif. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam audit internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Dalam era digital, teknologi memainkan peran penting dalam mempermudah dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan. Sistem berbasis aplikasi, seperti aplikasi web Puskeu Polri, memungkinkan pencatatan transaksi, pengelolaan dokumen, dan pelaporan dilakukan secara terintegrasi, cepat, dan transparan (Sabrina & Zuhri, 2023). Dengan dukungan sistem yang baik, proses pertanggungjawaban keuangan dapat menjadi lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan standar tata kelola yang baik, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi yang bersangkutan.

Pengadaan Barang dan Modal

Pengadaan barang dan modal merupakan proses yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi akan barang dan jasa guna mendukung operasional, peningkatan kinerja, dan pencapaian tujuan strategis (Zilal et al., 2024). Dalam konteks institusi publik seperti Kepolisian Daerah, pengadaan barang dan modal mencakup pembelian barang habis pakai, peralatan pendukung, hingga aset modal seperti kendaraan operasional, perangkat teknologi, dan infrastruktur lainnya. Proses ini harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pengadaan barang dan modal melibatkan beberapa tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan tender atau pengadaan langsung sesuai nilai dan sifat barang (Timang et al., 2022). Setelah barang atau jasa diterima, dilakukan proses verifikasi dan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa pengadaan telah sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, nilai kontrak, dan aturan pengelolaan keuangan. Dalam lingkungan Polri, pengadaan barang dan modal juga harus mendukung operasional yang cepat, tepat, dan terukur untuk memenuhi kebutuhan dinas yang beragam dan mendesak.

Namun, pengadaan barang dan modal sering menghadapi tantangan, seperti potensi penyimpangan, keterlambatan proses, atau ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang efektif, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi web Puskeu Polri, untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran. Dengan sistem pengadaan yang baik, organisasi dapat memastikan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan pelayanan publik, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat (Yulianti & Elwisam, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai sistem yang diterapkan serta menilai efektivitas penerapan sistem tersebut. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena menungkinkan peneliti untuk melakukan penggalian data secara mendalam dengan melakukan wawancara dan observasi langsung.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, 60231. Penelitian ini dilaksanakan selama masa magang yaitu kurang lebih sekitar 4 bulan.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Hal tersebut dikarenakan semua data diperoleh secara langsung dari Bidang Keuangan Polda Jatim. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dilakukan untuk mencatat atau mendokumentasikan informasi terkait data dan kejadian di lapangan serta informasi yang diberikan informan dalam hal ini yaitu anggota Subbiddalverif (Sub Bidang Pengendalian dan Verifikasi) Bidang Keuangan Polda Jatim. Proses wawancara dilakukan dengan alat perekam, kamera, dan buku tulis agar peneliti lebih mudah mencari kembali informasi yang tidak sempat tercatat dalam proses wawancara dan sebagai bukti keabsahan kegiatan wawancara.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Observasi

   Metode observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti beperan sebagai pengamat independen tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Dalam proses ini, peneliti melakukan pengamatan dengan memverifikasi data belanja barang dan modal yang diinput oleh seluruh satuan kerja di Polda Jatim serta melakukan interaksi dengan para staf terkiat.
3. Studi Kepustakaan

   Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi melalui berbagai sumber, seperti dokumen, buku, arsip, catatan, atau informasi dari internet yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen milik Satuan Kerja Polda Jatim serta jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian.

Metode dan Proses Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan mencari informasi yang diperlukan dan melihat masalah yang diteliti kemudian menyajikan hasil analisis tersebut apa adanya secara deskriptif. Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan terhadap penerapan aplikasi web Puskeu Polri pada Bidang Keuangan Polda Jatim berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem yang diterapkan.
2. Melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan aplikasi web Puskeu Polri pada Bidang Keuangan Polda Jatim dari segi penggunaan dan informasi yang dihasilkan.
3. Berdasarkan hasil pengamatan, selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian naratif.
4. Dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil pengamatan, kemudian peneliti memberikan saran terkait penerapan aplikasi web Puskeu Polri pada Bidang Keuangan Polda Jatim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Web Puskeu Polri sebagai Pengendalian Internal

Aplikasi web Puskeu Polri merupakan sebuah inovasi digital yang dirancang untuk memperkuat pengendalian internal dalam berbagai proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan pengadaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban di lingkungan Polri. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntanbilitas dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Dengan sistem berbasis web, aplikasi ini memungkinkan seluruh proses pencatatan, verifikasi, dan pelaporan keuangan dilakukan secara terintegrasi dan transparan. Hal ini membantu meminimalkan potensi kesalahan manual maupun praktik penyimpangan, sehingga mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, aplikasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan organisasi dan meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan. Pengendalian internal yang baik dan kuat sangat krusial karena membantu mencegah penyimpangan dan korupsi, mengingat tanggung jawab institusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Verifikasi membantu memastikan bahwa barang dan modal yang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

diperoleh tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan dibutuhkan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap item yang digunakan oleh kepolisian dapat mendukung tugas dan fungsi mereka secara efektif. Selain itu, proses ini juga menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai maksimal bagi institusi, di mana hanya barang yang benar-benar dibutuhkan yang akan diakuisisi.

Dalam konteks Kepolisian Daerah Jawa Timur, aplikasi web Puskeu Polri berperan penting dalam menyederhanakan proses pengadaan barang dan modal dengan memberikan kemudahan akses terhadap informasi secara real-time. Fitur-fitur seperti pencatatan otomatis, pelacakan anggaran, dan verifikasi berlapis memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran. Aplikasi ini juga memungkinkan proses audit internal dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, karena data yang disajikan telah terdokumentasi secara digital dan terpusat.

Sebagi alat pengendalian internal, aplikasi web Puskeu Polri tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat transparansi di setiap tahap pengelolaan keuangan. Dengan kemampuannya untuk memberikan laporan yang terstruktur dan mudah diakses, aplikasi ini mendukung upaya modernisasi tata kelola keuangan di lingkungan Polri, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Namun, efektivitas aplikasi ini bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetensi teknis para pengguna, sehingga diperlukan upaya yang konsisten untuk mendukung implementasinya secara optimal di seluruh wilayah operasional Polri.

Keuntungan Penerapan Aplikasi Web Puskeu Polri dalam Proses Verifikasi Perwabkeu

Penerapan aplikasi web Puskeu Polri memberikan berbagai keuntungan dalam proses verifikasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Salah satu keuntungan utama adalah peningkatan efisiensi waktu dan tenaga dalam proses verifikasi. Aplikasi ini memungkinkan data keuangan dicatat dan diverifikasi secara digital, sehingga mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, atau manipulasi. Dengan sistem yang terintegrasi, proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat karena informasi yang dibutuhkan tersimpan secara terpusat dan dapat diakses secara *real-time* oleh pihak terkait.

Selain itu, aplikasi ini meningkatkan akurasi dalam verifikasi perwabkeu dengan mengurangi risiko kesalahan manusia (*human error)* yang sering terjadi dalam proses manual. Fitur-fitur seperti pencatatan otomatis dan sistem validasi ganda memastikan bahwa data yang diinput telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, potensi ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam laporan keuangan dapat diminimalkan. Hal ini juga mendukung peningkatan akuntanbilitas karena setiap transaksi dan proses verifikasi terdokumentasi secara digital, sehingga mudah ditelusuri jika diperlukan audit atau pemeriksaan lebih lanjut.

Keuntungan lain adalah kemudahan dalam pelaporan dan pelacakan anggaran. Aplikasi ini memungkinkan pihak manajemen untuk memantau status verifikasi perwabkeu secara langsung, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini. Selain itu, penerapan aplikasi ini sejalan dengan prinsip *good governance* karena mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Polri. Dengan berbagai

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

keuntungan ini, aplikasi web Puskeu Polri menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam verifikasi perwabkeu, di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Hambatan Penerapan Aplikasi Web Puskeu Polri dalam Proses Verifikasi Perwabkeu

Penerapan aplikasi web Puskeu Polri dalam proses verifikasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) di Kepolisian Daerah Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar dapat berjalan optimal. Hambatan ini mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses verifikasi tersebut. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, seperti akses internet yang tidak stabil atau perangkat keras yang belum memadai. Masalah ini menghambat kelancaran operasional aplikasi, terutama di daerah-daerah terpencil yang masi mengalami kendala konektivitas. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi menjadi lambat atau bahka terhenti karena aplikasi bergantung sepenuhnya pada jaringan internet untuk mengolah dan menyimpan data.

Hambatan lainnya adalah kurangnya kompetensi teknis di kalangan pengguna aplikasi, terutama staf lapangan atau pihak yang belum terbiasa dengan sistem digital. Beberapa pengguna mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan fitur-fitur aplikasi, yang pada akhirnya mengurangi efisiensi dan efektivitas proses verifikasi. Ketidakpastian sumber daya manusia ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis yang diberikan secara menyeluruh dan berkala.

Selain itu, aplikasi ini juga menghadapi tantangan dalam hal ketergantungan terhadap sistem elektronik. Jika terjadi gangguan teknis, seperti kerusakan server, pemadaman listrik, atau serangan siber, seluruh proses verifikasi perwabkeu dapat terhenti. Hal ini menunjukkan perlunya sistem cadangan dan mekanisme pemulihan yang andal untuk mengantisipasi situasi darurat. Hambatan lainnya adalah kurangnya fitur analitik keuangan yang lebih mendalam dalam aplikasi, yang membuat proses verifikasi terkadang memerlukan bantuan alat atau aplikasi tambahan untuk analisis yang kompleks.

Hambatan-hambatan ini mengindikasikan bahwa meskipun aplikasi web Puskeu Polri memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas verifikasi perwabkeu, implementasinya masih memerlukan dukungan yang memadai, baik dalam hal infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, maupun perbaikan sistem untuk menghadapi tantangan teknis dan operasional.

Rekomendasi Perbaikan Aplikasi Web Puskeu Polri dalam Proses Verifikasi Perbawkeu

Berdasarkan hasil temuan, untuk meningkatkan efektivitas aplikasi web Puskeu Polri dalam proses verifikasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu), peneliti memberikan beberapa rekomendasi perbaikan. Pertama, penting untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pemerintah dan instansi terkait perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil, terutama di daerah terpencil, serta menyediakan perangkat keras yang memadai untuk mendukung penggunaan aplikasi. Penyediaan infrastruktur ini akan memastikan aplikasi dapat diakses dan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

digunakan secara optimal tanpa gangguan teknis yang disebabkan oleh keterbatasan jaringan atau perangkat.

Kedua, diperlukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang komprehensif dan berkelanjutan. Program pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang fungsi dan fitur aplikasi, serta simulasi proses verifikasi perwabkeu menggunakan aplikasi. Dengan meningkatkan kompetensi pengguna, terutama staf lapangan, implementasi aplikasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan penunjukkan tenaga pendukung khusus di setiap satuan kerja untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan teknis.

Ketiga, aplikasi perlu ditingkatkan dengan menambahkan fitur-fitur baru yang relevan untuk mendukung proses verifikasi perwabkeu secara lebih mendalam. Fitur seperti analisis otomatis terhadap kesalahan atau ketidaksesuaian data, sistem pengingat untuk batas waktu pengajuan laporan, serta visualisasi data keuangan dalam bentuk grafik atau diagram dapat membantu meningkatkan kualitas verifikasi dan mempermudah pengambilan keputusan. Selain itu, pengembang perlu memastikan aplikasi memiliki *user interface* yang intuitif agar mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknologi.

Keempat, untuk mengatasi risiko ketergantungan pada sistem elektronik, aplikasi ini harus dilengkapi dengan sistem pencadangan data otomatis dan mekanisme pemulihan darurat yang andal. Hal ini termasuk memastikan adanya server cadangan, penerapan enkripsi data untuk melindungi keamanan informasi, serta audit keamanan rutin untuk mencegah serangan siber. Selain itu, instansi perlu mempersiapkan prosedur manual sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan yang tidak terduga pada sistem.

Kelima, dilakukan evaluasi dan pembaruan aplikasi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan regulasi atau teknologi. Evaluasi ini dapat melibatkan umpan balik dari pengguna untuk mengidentifikasi kendala atau kebutuhan yang belum terakomodasi dari aplikasi. Dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut, aplikasi web Puskeu Polri diharapkan mampu mendukung proses verifikasi perwabkeu secara lebih optimal, efisien dan akuntanbel di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi web Puskeu Polri memiliki peran signifikan sebagai alat pengendalian internal dalam pengadaan barang dan modal, khususnya di bidang keuangan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Aplikasi ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntanbilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam proses verifikasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi di bidang keuangan Polda Jatim melalui verifikasi perwabkeu merupakan langkah strategis yang penting untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Dengan sistem berbasis digital, aplikasi mampu meminimalkan potensi kesalahan manual dan penyimpangan dalam proses pengadaan. Selain itu, kemudahan akses informasi secara real-time memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, sehingga mendukung terciptanya tata

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kelola keuangan yang modern dan terstandar. Meski demikian, untuk mencapai potensi optimalnya, aplikasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani.

Salah satu kekurangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa wilayah, seperti koneksi internet yang belum merata dan perangkat keras yang kurang memadai, sehingga menghambat penerapan aplikasi secara konsisten. Selain itu, kompetensi teknis pengguna, terutama staf lapangan, masih bervariasi, yang menyebabkan pemanfaatan aplikasi tidak optimal. Kekurangan lainnya adalah keterbatasan fitur aplikasi dalam menyediakan analitik keuangan yang lebih mendalam, sehingga pengambilan keputusan strategis masih membutuhkan dukungan alat tambahan. Aplikasi ini juga memiliki ketergantungan tinggi terhadap sistem elektronik, yang membuatnya rentan terhadap risiko seperti kegagalan sistem dan ancaman keamanan siber.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, perlu dilakukan penguatan infrastruktur teknologi informasi dengan menyediakan jaringan internet yang lebih stabil dan perangkat keras yang memadai di seluruh wilayah. Selain itu, program pelatihan intensif harus diadakan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi teknis penggunaan aplikasi. Pelatihan ini sebaiknya mencakup materi tentang fitur-fitur aplikasi dan strategi penggunaan yang efektif. Pengembang aplikasi juga disarankan untuk menambahkan fitur analitik keuangan yang lebih komprehensif, seperti pelaporan visual dan analisis tren anggaran, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, perlu diterapkan strategi manajemen risiko keamanan, sistem pencadangan data, audit keamanan rutin, dan perlindungan terhadap ancaman siber. Evaluasi berkala juga penting untuk memastikan aplikasi tetap relevan dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi serta regulasi. Dengan langkah-langkah tersebut, aplikasi web Puskeu Polri di harapkan dapat menjadi solusi yang lebih andal dan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan keuangan di lingkungan Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, D. M., Kartika Safitri, R., Ramadhansyah, D. S., Rahman, D. A., Amini, R., Salechah, D., Setiani, N., & Zukhri, Z. (2018). Implementasi Prinsip Desain Antarmuka pada Purwarupa Website Edukasi Bencana. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATi),* 11-2018

Liana, D., & Alya, N. (2023). Implementasi Pengendalian Internal Pada Aplikasi Akuntansi. *Acitya: Jurnal Vokasi Bisnis Digital, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Dan Usaha Perjalanan Wisata, 2(1),* 43.

Maulana, R. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAKSI: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi,* 2(1), 126-137. https://doi.org/10.31949/jaksi.v2il.1013

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*

Sabrina, T., & Zuhri, Z. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 11 No 3 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

(Studi Kasus Di PTN Pariwisata Pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif). *CIVITAS: Jurnal Studi Manajemen, 5(1)*, 10–24.

Sadjijono. (2007). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance.* Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Timang, A. K., E Saerang, D. P., Pangerapan, S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). Evaluasi Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. *Jurnal LPMM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 6(1)*, 565-574.

Wahono, P. S., Safuan, S., & Alhabshy, M. A. (2023). Penggunaan Aplikasi E-audit Dalam Sistem Informasi Manajemen Inspektorat Polri. Jurnal Ilmiah Global Education, 4(2), 1122-1130. https://doi.org/10.55681/jige.v4i2.869

Yulianti Sri, & Elwisam. (2024). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), Implementasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kompetensi SDM Melalui Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Lembaga Pemerintah ABC. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(4),* 2464-2477. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1870

Zilal, Z., Nurmayani, Wahyu, A. T., Mahza, A. S. D., Diana, A., & Oktarini, S. K. (2024). Pengendalian Internal Pengadaan Barang dan Jasa. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024, 3(5),* 1740-1751.